

Dari Partisipasi Simbolik ke Keterlibatan Substantif: Peran Masyarakat sebagai Sumber, Pelaksana, dan Pengguna Hasil Pendidikan

Catharina Clariza Kartika¹, Nabila Fakhirah¹, Nur Kalimah Mahiroh¹, Ovinda Oktaviana¹

¹Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Community participation in education still faces various obstacles, such as low levels of active involvement, a lack of communication between schools and the community, and the underutilization of the community in supporting education. This study aims to analyze the role of the community as a source, implementer, and user of educational outcomes. The study employs a qualitative approach using an integrative literature review method through the analysis of various journals, books, scientific articles, and policy documents relevant to the role of the community in education. The results indicate that the community serves as a source of education through the social and cultural environment, as an implementer of education through families, social organizations, and non-formal education, and as a user of educational outcomes who utilize and evaluate the quality of graduates. However, community participation remains largely administrative in nature and has not been optimally integrated into educational development, particularly in decision-making and providing feedback on educational outcomes. Therefore, this study underscores the importance of strengthening partnerships between schools and the community through collaborative forums, mapping community potential, and establishing feedback mechanisms from graduates to improve the quality and relevance of education. A limitation of this study is its reliance on secondary data sources, meaning that the findings depend on the scope and quality of the literature analyzed.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 22-05-2026

Revised: 24-06-2026

Accepted: 27-06-2026

KEYWORDS

community participation, community-based education, educational management, community empowerment, educational outcomes

Corresponding Author:

Catharina Clariza Kartika

Educational Management, Faculty of Education, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: catharina.clariza.kartika@mhs.unj.ac.id

Pendahuluan

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengelolaan lembaga pendidikan, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung seluruh proses pendidikan. Keterlibatan masyarakat melalui dukungan pemikiran, sumber daya, pengawasan, serta kerja sama dengan satuan pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan (Fawwaz & Susanty, 2024). Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Keterlibatan masyarakat pada banyak satuan pendidikan masih cenderung terbatas pada dukungan administratif dan pendanaan, sedangkan partisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi program pendidikan belum berjalan secara optimal. Selain itu, peran komite sekolah sebagai representasi masyarakat juga masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya pemahaman mengenai fungsi strategisnya dalam meningkatkan mutu pendidikan (Sukinawan et al., 2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (Republik Indonesia, 2003).

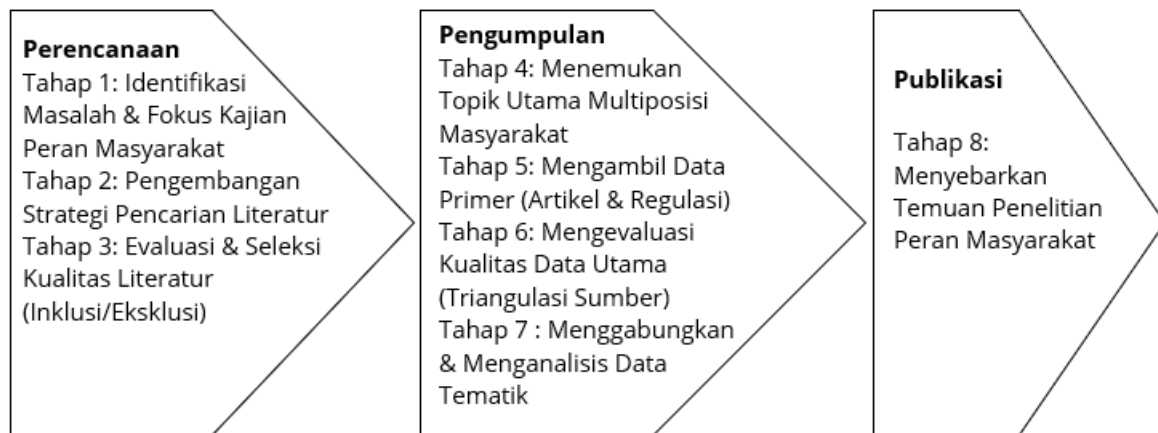
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar penyelenggaraan pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Artikel ini menawarkan perspektif bahwa masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga sebagai sumber nilai, budaya, dan pengetahuan yang menjadi dasar proses pendidikan, sebagai pelaksana pendidikan melalui keluarga maupun berbagai institusi sosial, serta sebagai pengguna hasil pendidikan yang memberikan umpan balik terhadap kualitas lulusan dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Integrative Literature Review (ILR). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji, mengintegrasikan, dan mensintesis berbagai hasil penelitian empiris, kajian teoritis, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan peran masyarakat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. *Integrative Literature Review* bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena melalui penggabungan berbagai perspektif dan temuan penelitian yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara daring menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar, Science and Technology Index (SINTA), Garuda, dan jurnal nasional maupun internasional yang terindeks. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci: partisipasi masyarakat dalam pendidikan, pendidikan berbasis masyarakat, peran masyarakat dalam pendidikan, *community participation in education*, *community-based education*, serta manajemen pendidikan berbasis masyarakat.

Tinjauan ini dilakukan berdasarkan pedoman langkah-langkah yang diadaptasi dari framework ILR yang sistematis. Adapun langkah-langkah *Integrative Literature Review* yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan sebagaimana gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Langkah-langkah *Integrative Literature Review*

Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel yang membahas peran masyarakat dalam pendidikan, pendidikan berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, atau hubungan sekolah dan masyarakat; (2) artikel yang dipublikasikan pada rentang tahun 2015–2025; (3) artikel yang memiliki metodologi penelitian yang jelas; (4) artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional yang memiliki ISSN; serta (5) dokumen kebijakan yang relevan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang tidak relevan dengan tema penelitian; (2) artikel yang tidak memiliki informasi metodologi yang jelas; (3) prosiding, opini, dan artikel populer yang tidak melalui proses penelaahan ilmiah (*peer review*); serta (4) artikel yang hanya membahas pendidikan tanpa mengaitkannya dengan peran masyarakat.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Temuan-temuan dari berbagai literatur diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu masyarakat sebagai sumber pendidikan, masyarakat sebagai pelaksana pendidikan, masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan, serta analisis kritis terhadap peran multiposisi masyarakat dalam pendidikan. Hasil sintesis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta implikasinya terhadap manajemen dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil dan Diskusi

1. Konsep Peran Masyarakat dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif sistem pendidikan nasional, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima hasil pendidikan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam penyelenggaraan pendidikan (Suci et al., 2020). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Secara teoritis, Ki Hajar Dewantara melalui konsep Tri Pusat Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan berlangsung dalam tiga lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya, keberhasilan pendidikan tidak dapat dicapai hanya melalui institusi formal, melainkan membutuhkan dukungan sosial yang luas dari lingkungan masyarakat.

Permasalahan yang muncul dalam konteks peran masyarakat dalam pendidikan adalah masih rendahnya kualitas partisipasi masyarakat (Rezani & Maharani, 2023). Dalam praktiknya, masyarakat sering kali hanya dilibatkan dalam bentuk kontribusi material seperti pembayaran iuran, bantuan pembangunan sarana, atau dukungan acara sekolah, sementara keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan pendidikan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya reduksi makna partisipasi masyarakat. Menurut teori partisipasi melalui Ladder of Citizen Participation, partisipasi ideal berada pada *level partnership* hingga *citizen control*, yaitu ketika masyarakat memiliki posisi sejajar dengan lembaga dalam menentukan kebijakan. Namun pada realitas pendidikan Indonesia, keterlibatan masyarakat masih cenderung berada pada level *tokenism* atau formalitas.

Dalam perspektif kritis, masyarakat memiliki tiga fungsi strategis dalam pendidikan, yaitu sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Sebagai sumber pendidikan, masyarakat menyediakan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, serta modal sosial yang dapat menunjang proses pembelajaran (Hermawan et al., 2025). Menekankan pentingnya *social capital* berupa jaringan sosial, norma, dan kepercayaan dalam meningkatkan keberhasilan pendidikan. Lingkungan masyarakat yang memiliki budaya belajar tinggi cenderung menghasilkan peserta didik dengan motivasi dan capaian akademik yang lebih baik. Sebagai pelaksana pendidikan, masyarakat menjalankan fungsi pendidikan melalui keluarga, organisasi sosial, komunitas belajar, lembaga keagamaan, kursus, serta pendidikan nonformal. Hal ini memperluas makna pendidikan sebagai proses sepanjang hayat (*lifelong education*). Sementara sebagai pengguna hasil pendidikan, masyarakat menjadi pihak yang menerima lulusan dan menilai relevansi kompetensi yang dihasilkan lembaga pendidikan terhadap kebutuhan sosial dan dunia kerja.

Keterkaitan peran masyarakat dengan manajemen pendidikan terlihat jelas dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Mulyasa (2022), MBS menempatkan sekolah sebagai organisasi yang otonom dengan prinsip partisipasi,

transparansi, dan akuntabilitas. Dalam fungsi manajemen, masyarakat berkontribusi pada tahap perencanaan melalui identifikasi kebutuhan sekolah dan penyusunan program, pada tahap pengorganisasian melalui komite sekolah dan dewan pendidikan, pada tahap pelaksanaan melalui dukungan sumber daya dan program kolaboratif; serta pada tahap pengawasan melalui monitoring mutu layanan pendidikan dan transparansi anggaran. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan.

Dari perspektif Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan sosial (Sjam, 2025). Pendidikan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan memperkuat kapasitas komunitas dalam memecahkan persoalan sosial, meningkatkan literasi, dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya investasi sumber daya manusia. Konsep ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire mengenai pendidikan sebagai praktik pembebasan (*education as liberation*), di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga agen perubahan sosial. Pendidikan berbasis masyarakat juga mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi kelompok marginal, melalui model pendidikan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

2. Masyarakat sebagai Sumber Pendidikan

Masyarakat menempati posisi strategis sebagai sumber pendidikan karena menyediakan lingkungan belajar yang nyata, kontekstual, dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah sebagai lembaga formal, tetapi juga terbentuk melalui interaksi sosial, budaya, norma, tradisi, serta pengalaman hidup yang berkembang di tengah masyarakat (Yusnaldi et al., 2024). Dalam perspektif pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat berperan sebagai penyedia nilai, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi peserta didik.

Secara konseptual, terdapat tiga posisi masyarakat dalam pendidikan, yaitu masyarakat sebagai objek pendidikan, mitra pendidikan, dan sumber pendidikan. Sebagai objek pendidikan, masyarakat hanya dipandang sebagai penerima hasil pendidikan. Sebagai mitra pendidikan, masyarakat berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui komite sekolah atau bantuan sumber daya. Sementara itu, sebagai sumber pendidikan, masyarakat menjadi bagian aktif dalam proses pembelajaran melalui pemanfaatan potensi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan setempat sebagai bahan belajar. Posisi terakhir ini memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman autentik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang cenderung menempatkan masyarakat hanya sebagai pendukung administratif atau penyedia dana. Kondisi tersebut

menyebabkan pembelajaran kurang kontekstual dan belum sepenuhnya menghubungkan materi dengan realitas sosial peserta didik. Hambatan lainnya meliputi kurangnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat, minimnya pemetaan potensi lokal, keterbatasan kerja sama dengan dunia usaha dan komunitas, serta belum optimalnya pemanfaatan tokoh masyarakat sebagai sumber belajar. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki masyarakat belum dapat diintegrasikan secara maksimal dalam proses pendidikan. Sebagai contoh, beberapa sekolah telah mengembangkan pembelajaran berbasis lingkungan dan budaya lokal dengan melibatkan masyarakat sekitar. Misalnya, peserta didik mempelajari kewirausahaan melalui kunjungan ke usaha mikro di lingkungan sekitar, mempelajari sejarah daerah melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, atau memanfaatkan kegiatan sosial masyarakat sebagai proyek pembelajaran. Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi laboratorium sosial yang memperkuat keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, serta pembentukan karakter peserta didik.

Dalam perspektif Manajemen Pendidikan, pemanfaatan masyarakat sebagai sumber pendidikan berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan (Nurrisa & Sabda, 2025). Secara operasional, sekolah dapat membangun forum sekolah–masyarakat sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan orang tua, tokoh masyarakat, organisasi sosial, serta dunia usaha. Forum ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan menyusun program yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, sekolah perlu melakukan pemetaan potensi lokal untuk mengidentifikasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, seperti budaya daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, tempat ibadah, maupun lingkungan alam sekitar. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum kontekstual dan kegiatan pembelajaran berbasis proyek.

Pelibatan tokoh masyarakat juga menjadi mekanisme penting dalam menghubungkan sekolah dengan lingkungan sosial. Tokoh agama, tokoh budaya, pelaku usaha, maupun alumni dapat berkontribusi sebagai narasumber, mentor, atau pendamping kegiatan peserta didik. Kolaborasi ini dapat memperkaya pengalaman belajar sekaligus menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, sekolah juga dapat melaksanakan *tracer study* terhadap lulusan untuk mengetahui tingkat keberhasilan lulusan di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Informasi tersebut dapat diperkuat melalui forum umpan balik pengguna lulusan, seperti dunia usaha, industri, dan lembaga masyarakat, sehingga sekolah memperoleh masukan mengenai kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan program pendidikan dan kurikulum.

Di samping itu, kolaborasi dengan dunia usaha dan komunitas lokal menjadi langkah strategis dalam memperluas sumber belajar peserta didik. Kerja sama dapat diwujudkan melalui kegiatan magang, kunjungan industri, program kewirausahaan, proyek sosial, maupun pendampingan oleh komunitas masyarakat. Dengan demikian, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan dunia kerja. Implikasi dari optimalisasi masyarakat sebagai sumber pendidikan adalah terciptanya pendidikan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan sosial. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi berkembang melalui aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan komunitas. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan masyarakat perlu diarahkan pada pemberdayaan komunitas, penguatan literasi masyarakat, serta pembentukan budaya belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*). Dengan menempatkan masyarakat sebagai sumber pendidikan, akan terbentuk hubungan timbal balik yang kuat antara sekolah dan komunitas dalam menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif, kritis, dan relevan dengan tantangan zaman.

3. Masyarakat sebagai Pelaksana Pendidikan

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah dan pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut de Matos Pedro dalam Dewi dan Suriansyah (2025), masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pendidikan, melainkan juga sebagai pelaksana sekaligus mitra utama dalam proses pendidikan. Pandangan ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya Pasal 8 yang menegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pendidikan. Selain itu, Pasal 54 menegaskan pentingnya pendidikan berbasis masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan pendidikan nasional.

Dalam perspektif pendidikan berbasis masyarakat, keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Dwiyama et al. (2020) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan mencakup bantuan finansial, material, akademik, kultural, dan evaluatif. Bantuan finansial dapat berupa pemberian dana untuk mendukung pengembangan pendidikan, seperti penyediaan beasiswa, pembangunan sarana ibadah, maupun pendanaan kegiatan peserta didik. Bantuan material diwujudkan melalui penyediaan bahan bangunan atau sarana pendukung untuk perbaikan dan pengembangan fasilitas pendidikan. Sementara itu, bantuan akademik dapat berupa perhatian orang tua terhadap proses belajar anak di rumah, pemberian beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, hingga penyediaan tempat magang untuk memperluas pengalaman belajar siswa di dunia kerja.

Selain dukungan yang bersifat material dan akademik, masyarakat juga berperan dalam aspek kultural dan evaluatif. Bantuan kultural diwujudkan melalui pemeliharaan nilai-nilai moral, keteladanan, dan budaya positif yang mendukung pembentukan karakter peserta didik. Adapun bantuan evaluatif dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dalam mengawasi serta mengontrol penyelenggaraan pendidikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penyokong sumber daya pendidikan, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.

Implementasi peran masyarakat sebagai pelaksana pendidikan dapat dilihat pada penelitian Dwiyama et al. (2020) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya orang tua, berpartisipasi aktif melalui komite sekolah dan berbagai kegiatan pendidikan. Bentuk keterlibatan tersebut mencakup pemberian bantuan dana, material bangunan, dukungan nonmaterial, serta keikutsertaan dalam kegiatan sekolah. Salah satu bukti nyata partisipasi masyarakat adalah pembangunan musholla yang sepenuhnya merupakan hasil swadaya masyarakat melalui kontribusi dana, material, dan tenaga. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam penyusunan visi, misi, dan program kerja sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan lingkungan.

Meskipun berbagai regulasi telah memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat, dalam praktiknya keterlibatan tersebut belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala utama adalah masih adanya persepsi bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab penuh sekolah dan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif dan transaksional, yang umumnya hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan administratif atau finansial, seperti pembayaran iuran dan pengambilan rapor. Padahal, keberhasilan pendidikan membutuhkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama (Pakniyany et al., 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah kondisi sosial ekonomi. Rahaju (2023) menjelaskan bahwa keterbatasan ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi penyebab rendahnya partisipasi, terutama di wilayah pedesaan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, teknologi, dan sumber belajar yang memadai. Akibatnya, dukungan yang dapat diberikan kepada lembaga pendidikan maupun kepada peserta didik menjadi terbatas.

Pendidikan tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas. Masyarakat juga menjadi tempat belajar yang penting karena peserta didik belajar memahami nilai, sikap, dan kehidupan sosial dari lingkungan sekitarnya. Masyarakat lebih memahami kebutuhan

daerahnya sendiri, misalnya pendidikan pertanian di desa atau pendidikan berbasis teknologi di kota. Tanpa keterlibatan masyarakat, pendidikan bisa menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi kehidupan sosial di sekitarnya.

Dalam manajemen pendidikan, masyarakat berkedudukan sebagai stakeholder kunci yang menentukan keberhasilan sebuah lembaga. Keterlibatan ini diwujudkan melalui empat fungsi manajerial, pada tahap perencanaan, masyarakat memberikan masukan agar kurikulum relevan dengan kebutuhan lingkungan; dalam pengorganisasian, warga berperan aktif melalui Komite Sekolah atau forum pendidikan; pada fase pelaksanaan, masyarakat menyokong program sekolah lewat penyediaan sumber daya dan motivasi; serta dalam pengawasan, mereka memastikan layanan pendidikan berjalan transparan dan akuntabel.

Transformasi peran masyarakat sebagai pelaksana ini mengubah paradigma pendidikan masyarakat menjadi lebih mandiri dan inklusif. Pendekatan pendidikan bergeser dari model *top-down* menjadi *bottom-up* yang berbasis pada pemberdayaan aset dan potensi lokal, seperti pelatihan ekonomi kreatif sesuai keahlian warga setempat. Selain itu, munculnya pusat-pusat belajar komunitas mendukung terciptanya budaya belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang menghapus sekat usia dalam menuntut ilmu. Pada akhirnya, keterlibatan aktif ini memperkuat modal sosial dan semangat gotong royong, membangun ekosistem pendidikan yang tangguh di mana masyarakat mampu mendeteksi serta menyelesaikan problematika sosialnya secara mandiri melalui jalur edukasi.

4. Masyarakat sebagai Pengguna Hasil Pendidikan

Masyarakat sebagai penanggung jawab pendidikan nonformal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Masyarakat terdiri atas individu-individu dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan profesi yang beragam sehingga memiliki pengaruh terhadap perkembangan peserta didik sekaligus berperan sebagai pengguna hasil pendidikan (Hijrah & Aini, 2023). Dalam hal ini, masyarakat memanfaatkan kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang dimiliki lulusan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sosial maupun dunia kerja. Oleh karena itu, kualitas hasil pendidikan pada akhirnya akan dinilai melalui sejauh mana lulusan mampu beradaptasi, berkontribusi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 dinyatakan bahwa masyarakat dapat berperan sebagai pelaksana sekaligus pengguna hasil pendidikan (Republik Indonesia, 2003). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menerima lulusan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan penilaian, masukan, dan umpan balik terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dengan demikian,

masyarakat memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa hasil pendidikan yang dihasilkan lembaga pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang.

Peran masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan dapat dilihat secara nyata melalui keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memanfaatkan kompetensi lulusan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. DUDI tidak hanya berperan sebagai penyerap lulusan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Namun, berbagai penelitian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Kewo dkk. (2024) menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran lulusan SMK salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, keterbatasan penguasaan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, serta rendahnya daya serap industri terhadap lulusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pengguna lulusan secara optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi aktual peran masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan. Secara ideal, masyarakat berfungsi sebagai pemberi umpan balik yang aktif terhadap mutu lulusan dan kebutuhan kompetensi yang diperlukan. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat sering kali hanya berperan sebagai penerima hasil pendidikan tanpa dilibatkan secara sistematis dalam proses evaluasi dan pengembangan kurikulum. Akibatnya, lembaga pendidikan berpotensi menghasilkan lulusan yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan pengguna lulusan masih cenderung bersifat satu arah, di mana sekolah menghasilkan lulusan sementara masyarakat hanya menerima hasilnya tanpa memiliki ruang yang cukup untuk mempengaruhi proses pendidikan.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi evaluasi, pengendalian mutu, dan perencanaan pendidikan. Masukan dari masyarakat, khususnya DUDI, dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum, pengembangan kompetensi peserta didik, serta perbaikan program pembelajaran. Menurut Ismail (2022), kebijakan *link and match* memungkinkan DUDI terlibat dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan praktik kerja lapangan, hingga penilaian kompetensi peserta didik. Namun demikian, implementasi kemitraan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dalam banyak kasus, keterlibatan DUDI masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Demikian pula, komite sekolah dan unsur masyarakat lainnya sering kali hanya dilibatkan pada aspek administratif tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan sekolah.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih partisipatif dan berkelanjutan untuk memperkuat peran masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain melalui pelaksanaan tracer study untuk mengetahui relevansi kompetensi lulusan, pembentukan forum umpan balik pengguna lulusan, pelibatan dunia usaha dan dunia industri dalam evaluasi kurikulum, serta penguatan kemitraan antara sekolah, masyarakat, dan komunitas lokal. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima hasil pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan demikian, peran masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan memiliki implikasi yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin aktif masyarakat memberikan umpan balik terhadap hasil pendidikan, semakin besar pula peluang lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hubungan timbal balik antara lembaga pendidikan dan masyarakat tersebut akan menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif, relevan, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan masyarakat.

5. Analisis Kritis Peran Multiposisi Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena berfungsi sebagai sumber pendidikan, pelaksana pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan. Sebagai sumber pendidikan, masyarakat menjadi lingkungan yang menyediakan nilai, norma, budaya, serta pengalaman sosial yang membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat memberikan pengalaman belajar yang tidak selalu diperoleh di sekolah sehingga mampu memperkaya proses pendidikan dan mendukung terbentuknya peserta didik yang memiliki kemampuan akademik maupun sosial. Oleh karena itu, masyarakat menjadi salah satu komponen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna (Fawwaz & Susanty, 2024).

Selain sebagai sumber pendidikan, masyarakat juga berperan sebagai pelaksana pendidikan melalui keluarga, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan berbagai komunitas yang turut berkontribusi dalam proses pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pendidikan menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada pada lembaga formal, tetapi juga memerlukan dukungan dari lingkungan sosial. Partisipasi masyarakat dapat memperluas akses pendidikan, memperkuat pelaksanaan program sekolah, serta membantu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat (Arifannisa, 2025).

Di sisi lain, masyarakat merupakan pengguna hasil pendidikan karena secara langsung menerima manfaat dari kualitas lulusan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Lulusan yang memiliki kompetensi, karakter, dan kemampuan beradaptasi yang baik

akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat. Sebaliknya, apabila hasil pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan zaman, maka akan muncul kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan lingkungan (Chairani et al., 2024).

Meskipun demikian, implementasi peran multiposisi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih belum berjalan secara optimal. Pada praktiknya, keterlibatan masyarakat masih banyak terbatas pada pemberian bantuan dana, penyediaan sarana prasarana, atau keikutsertaan dalam kegiatan tertentu yang bersifat insidental. Sementara itu, partisipasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi pendidikan masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya diposisikan sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, padahal keterlibatan yang lebih luas dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu penyelenggaraan pendidikan (Sukinawan et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal partisipasi masyarakat dengan implementasinya di lapangan. Masyarakat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi pendidikan, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya ruang partisipasi dan kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan yang lebih partisipatif sehingga masyarakat dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa, peran multiposisi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sinergi yang baik antara sekolah dan masyarakat akan mendorong terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan mutu lulusan, serta mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki tiga peran utama dalam pendidikan, yaitu sebagai sumber pendidikan, pelaksana pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan. Sebagai sumber pendidikan, masyarakat menyediakan lingkungan sosial, budaya, nilai, dan pengalaman yang mendukung proses belajar. Sebagai pelaksana pendidikan, masyarakat berkontribusi melalui keluarga, organisasi

sosial, lembaga keagamaan, serta berbagai bentuk pendidikan nonformal. Sementara itu, sebagai pengguna hasil pendidikan, masyarakat memanfaatkan sekaligus menilai kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan sosial dan dunia kerja.

Meskipun demikian, ketiga peran tersebut belum berjalan secara seimbang. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih sering bersifat administratif dan formalitas, seperti pemberian bantuan dana, penyediaan sarana, atau keterlibatan pada kegiatan tertentu yang bersifat insidental. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta evaluasi pendidikan masih relatif terbatas sehingga potensi masyarakat sebagai mitra strategis pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat memerlukan mekanisme partisipasi yang lebih substantif. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya membutuhkan dukungan material, tetapi juga kolaborasi aktif antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pengguna lulusan dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan.

Secara praktis, sekolah perlu membangun forum komunikasi yang aktif dan berkelanjutan dengan masyarakat guna memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas kemitraan. Selain itu, masyarakat perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Pengguna lulusan, termasuk dunia usaha, dunia industri, dan komunitas lokal, juga perlu dilibatkan melalui mekanisme umpan balik agar mutu pendidikan dan kompetensi lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian yang dilakukan masih berbasis studi literatur sehingga temuan yang dihasilkan bergantung pada hasil penelitian dan sumber pustaka yang digunakan. Kedua, penelitian ini belum menggunakan data lapangan secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun studi kasus sehingga belum menggambarkan secara empiris implementasi peran masyarakat dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Referensi

- Analisna, A., Sulistiani, S., & Yasin, M. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 1–12. <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/alamiyah/article/view/67>
- Arifah, F. (2024). Menjelaskan keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pengembangan kurikulum. https://www.academia.edu/download/120774781/Menjelaskan_Keterlibatan_Orang_Tua_dan_Komunitas_dalam_Pengembangan_Kurikulum.pdf

- Arifannisa, A. (2025). Manajemen pendidikan berbasis komunitas: Peran kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sosial dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di wilayah tertinggal. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1546–1558. <https://al-haramjournal.com/index.php/Joong-Ki/article/view/11597>
- Chairani, S. A., Yana, J., Ilham, N., & Andriani, O. (2024). Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 370–375. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/578>
- Dewi, R., & Suriansyah, A. (2025). Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan: Studi kualitatif pada sekolah di pedesaan dan perkotaan. *Elementary: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/10.51878/elementary.v5i1.4158>.
- Dwiyama, F., Adriani, A., Ismia, I., & Oktafiana, R. (2020). Manajemen humas: Membangun peran masyarakat pada lembaga pendidikan. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 63–71. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/view/868/595>
- Hasmiati. (2015). Pendidikan berbasis masyarakat. *Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 7(1), 101–107. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/181/102>
- Hayat, A., Qamar, K., & Wulandari, T. C. (2024). Implementation of non-formal education based on rural communities. *Journal of Nonformal Education*, 10(2), 425–434. <https://doi.org/10.15294/jone.v10i2.11434>
- Hermawan, R., Wulandari, N. P., Magfiroh, V. S., & Hilman, C. (2025). Peran pendidikan berbasis masyarakat dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di masyarakat. *Journal of Islamic Religious Education*, 1(3), 108–117. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/joire/article/view/2761/1767>
- Hijrah, I. F., & Aini, S. N. (2023). Peran dan kedudukan masyarakat sebagai landasan pendidikan Islam dalam perspektif sosiologi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 915–923. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2206>
- Ismail, R. (2022). Partisipasi dunia usaha dunia industri dalam peningkatan mutu lulusan sekolah menengah kejuruan se-Kota Gorontalo. *Jurnal Informatika dan Teknologi Pendidikan*, 2(1), 23–27. <https://www.jurnalitp.web.id/index.php/jitp/article/view/22>
- Kewo, C. L., & Tuerah, R. M. (2024). Meningkatkan minat kewirausahaan bagi siswa-siswi SMK dalam memasuki dunia usaha dan dunia industri (DUDI). *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 2003–2008. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/9592>
- Nurrisa, F., & Sabda, S. (2025). Konsep kedudukan dan peran masyarakat sebagai landasan pendidikan Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTPP)*, 2(3),

845–851. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/601/564>

Pakniyany, N. S. L., Imron, A., & Degeng, I. N. S. (2020). Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 5(3), 271–278. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v5i3.13225>

Rahaju, A. (2023). Peran pendidikan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah perdesaan. *Jurnal Manajemen Lintas Ilmu*. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3928/3101>

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Pemerintah Republik Indonesia.

Rezani, R. M., & Maharani, S. (2023). Peran masyarakat dalam desentralisasi pendidikan. 6, 4776–4783.

Sada, H. J. (2017). Peran masyarakat dalam pendidikan perspektif pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 117–125. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/2120>

Sjam, D. A. (2025). Peran pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan karakter di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 231–243. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/43153>

Sukinawan, K., Karwanto, K., Widodo, B. S., Khamidi, A., Haq, M. S., & Amalia, K. (2025). Peran strategis komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Tinjauan literatur. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3974–3982. <http://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JlIP/article/view/7628>

Susanty, S. (2024). Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan menuju sekolah bermutu. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 221–238. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/terapung/article/view/16291>

Yusnaldi, E., Napitupulu, M. R., Nst, A. M., & Syaskia, E. (2024). Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. 8, 26384–26389. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16448>